

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut telah menjadi isu yang penting untuk ditangani di kawasan Pasifik Selatan khususnya Tuvalu. Sebab dalam isu ini berkaitan langsung dengan keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup serta keselamatan warga negara Tuvalu. Selaku negara tetangga, Australia menawarkan bantuan melalui perjanjian Falepili dengan menawarkan visa khusus untuk membantu kedatangan warga Tuvalu ke Australia. Pada bab ini akan memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

Tabel Literature Review

No	Judul dan Penulis	Tahun	Temuan
1.	<i>The Australia–Tuvalu Falepili Union Treaty: Statehood and Security in the Face of Anthropogenic Climate Change</i> – Nicole Green & Douglas Guilfoyle	2024	Falepili Union Treaty menciptakan preseden hukum baru dengan mengakui keberlanjutan kenegaraan Tuvalu meskipun wilayah fisiknya terancam, namun klausul keamanan berpotensi menimbulkan ketergantungan struktural terhadap Australia.
2.	<i>Sinking States’ Open Questions: Continuity of Statehood and Human Rights Protection of Forcibly Displaced People</i> – Elena Ardito	2024	Perjanjian Falepili Union dipandang sebagai mekanisme perlindungan HAM dan mobilitas warga Tuvalu, tetapi memunculkan dilema antara perlindungan negara kecil dan pembatasan otonomi strategis.

3.	<i>Australian Foreign Aid Motivation for Tuvalu in Efforts to Cope with Climate Change 2015–2020</i> – Farah Diba Hallatu & Irma Indrayani	2022	Bantuan iklim Australia kepada Tuvalu merupakan strategi soft power untuk mempertahankan pengaruh regional dan mengimbangi kehadiran China di Pasifik Selatan.
4.	<i>A Dysfunctional Family: Australia's Relationship with Pacific Island States and Climate Change</i>	2024	Kebijakan iklim Australia di Pasifik bersifat instrumental dan paternalistik; diplomasi iklim digunakan sebagai soft power untuk mempertahankan pengaruh geopolitik dan kepemimpinan regional, termasuk melalui perjanjian bilateral seperti Falepili Union Treaty.
5.	<i>Migration as Adaptation? The Falepili Union Between Australia and Tuvalu</i> – Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change	2024	Migrasi dalam Falepili Union diposisikan sebagai strategi adaptasi iklim, namun keberhasilannya bergantung pada integrasi kebijakan migrasi dan investasi berkelanjutan di Tuvalu.
6.	<i>Fale Pili: A Tuvaluan Perspective on Mobility Justice</i> – Kitara, Suliman, & Farbotko	2024	Konsep budaya <i>fale pili</i> menekankan mobilitas berbasis solidaritas dan kolektivisme, yang menantang pendekatan migrasi Barat yang individualistik.

7.	<i>The 'New Pacific Diplomacy': An Introduction</i> – Greg Fry & Sandra Tarte	2015	Negara-negara Pasifik semakin menegaskan kemandirian diplomatik dan memperkuat posisi tawar mereka dalam isu perubahan iklim di tingkat global.
8.	<i>Climate Change Diplomacy and the Geopolitics of Energy Transition</i> – Shehzad, Bakht, & Nadeem	2021	Diplomasi iklim beririsan dengan geopolitik dan kepentingan nasional, di mana isu lingkungan digunakan sebagai instrumen kekuasaan dan legitimasi global.
9.	<i>Critical Reflections on the Theories of Security Studies Based on Climate Change Issues</i> – Xuanchang Cao	2021	Perubahan iklim dipahami sebagai isu keamanan non-tradisional, namun pendekatan realistis tetap relevan dalam menjelaskan dinamika kekuasaan antarnegara.
10.	<i>Leading from the Frontline: A History of Pacific Climate Diplomacy</i> – Morgan, Carter, & Manoa	2021	Negara-negara kepulauan Pasifik berhasil memanfaatkan diplomasi iklim dan koalisi internasional untuk memperkuat posisi mereka dalam negosiasi global.

Jurnal berjudul “The Australia–Tuvalu Falepili Union Treaty: Statehood and Security in the Face of Anthropogenic Climate Change” karya Nicole Green dan Douglas Guilfoyle (2024) memberikan analisis awal mengenai implikasi hukum dan politik dari Falepili Union Treaty sebagai respons bilateral terhadap

ancaman perubahan iklim yang mengancam kelangsungan negara Tuvalu. Jurnal ini menyoroti dua isu utama: pertama, bagaimana perjanjian tersebut menciptakan preseden normatif bahwa negara dapat mempertahankan status kenegaraannya meskipun wilayah fisiknya terancam tenggelam; dan kedua, bagaimana perjanjian ini memosisikan Australia sebagai aktor yang menyediakan *security guarantee* melalui bantuan bencana, dukungan pembangunan, dan jalur migrasi khusus. Green dan Guilfoyle juga memberi perhatian pada klausul keamanan yang dianggap dapat menimbulkan ketergantungan struktural karena mengharuskan Tuvalu berkonsultasi dengan Australia dalam kerja sama pertahanan dan infrastruktur kritis, sehingga memunculkan dilema antara perlindungan dan otonomi.

Jurnal kedua berjudul "*Sinking States' Open Questions: Continuity of Statehood and Human Rights Protection of Forcibly Displaced People. The Case of Tuvalu in Light of the Falepili Union Treaty*" karya Elena Ardito (2024) membahas bagaimana Tuvalu menghadapi ancaman tenggelam akibat perubahan iklim dan apa saja konsekuensinya terhadap keberlanjutan status negara serta perlindungan hak-hak warganya. Jurnal ini menjelaskan bahwa Falepili Union Treaty menjadi langkah penting karena perjanjian ini mengakui bahwa Tuvalu tetap dapat mempertahankan status kenegaraannya meskipun wilayah fisiknya terancam hilang. Selain itu, jurnal ini menyoroti bagaimana jalur mobilitas yang diberikan Australia dapat menjadi bentuk perlindungan HAM bagi warga Tuvalu, terutama terkait akses tinggal, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan identitas budaya. Namun, Ardito juga menyinggung adanya kontroversi terkait klausul keamanan yang membuat Australia memiliki pengaruh besar terhadap keputusan strategis Tuvalu, terutama dalam isu pertahanan dan infrastruktur penting.

Penelitian Farah Diba Hallatu dan Irma Indrayani (2022) berjudul "Australian Foreign Aid Motivation for Tuvalu in Efforts to Cope with Climate Change 2015-2020" dalam *Journal of Social Political Sciences* menganalisis motivasi Australia memberikan bantuan luar negeri kepada Tuvalu untuk mengatasi dampak perubahan iklim periode 2015-2020. Menggunakan teori bantuan luar negeri, soft power, dan politik hijau, penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan Australia senilai \$3,2 juta sejak 2016 merupakan strategi soft power untuk

mempertahankan dominasi di Kawasan Pasifik dan mengantisipasi pengaruh Tiongkok. Penelitian ini mengungkap kontradiksi Australia yang memberikan bantuan iklim namun tetap mempertahankan industri batubara penghasil emisi tinggi, menunjukkan komitmen rendah terhadap target iklim Paris Agreement.

A Dysfunctional Family: Australia's Relationship with Pacific Island States and Climate Change karya Liam Moore (2024) menganalisis hubungan Australia dengan negara-negara Kepulauan Pasifik dalam konteks perubahan iklim dan menyoroti adanya ketegangan antara narasi solidaritas dan praktik kebijakan luar negeri Australia. Moore berargumen bahwa Australia kerap membingkai kawasan Pasifik sebagai “Pacific family”, namun pada praktiknya menunjukkan pendekatan yang instrumental dan paternalistik dengan menempatkan diri sebagai aktor dominan, sementara agensi politik negara-negara Pasifik sering diabaikan. Artikel ini menunjukkan bahwa Australia secara konsisten melemahkan atau menunda komitmen regional terkait perubahan iklim, meskipun negara-negara Pasifik memandang isu tersebut sebagai ancaman eksistensial. Moore menyimpulkan bahwa relasi asimetris dan ketidakselarasan normatif tersebut menjadikan hubungan Australia–Pasifik bersifat disfungsi dan menghambat terciptanya kerja sama kawasan yang setara dan berkelanjutan.

Artikel “*Migration as Adaptation? The Falepili Union Between Australia and Tuvalu*” yang diterbitkan dalam *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change* (2024) membahas Perjanjian Falepili Union sebagai bentuk kerja sama bilateral antara Australia dan Tuvalu dalam merespons dampak perubahan iklim. Perjanjian ini berfokus pada tiga pilar utama, yaitu adaptasi perubahan iklim, migrasi, dan keamanan, dengan ketentuan penting berupa pemberian akses tinggal dan bekerja bagi warga negara Tuvalu di Australia. Artikel ini secara khusus menganalisis migrasi sebagai strategi adaptasi terhadap perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan Tuvalu sebagai negara kepulauan kecil. Penulis menilai bahwa migrasi berpotensi menjadi mekanisme adaptasi yang efektif, namun keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan kebijakan yang menyeluruh. Dukungan tersebut meliputi fasilitasi integrasi sosial dan ekonomi migran Tuvalu

di Australia, serta komitmen investasi berkelanjutan di Tuvalu, khususnya pada sektor perlindungan pesisir, infrastruktur, dan teknologi informasi.

Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya kerja sama bilateral dalam pengelolaan remitansi, pemanfaatan keterampilan tenaga kerja migran, dan pengawasan skema migrasi. Tanpa pengelolaan yang tepat, migrasi justru berpotensi menjadi maladaptasi yang melemahkan ketahanan sosial dan ekonomi Tuvalu. Oleh karena itu, migrasi diposisikan sebagai bagian dari strategi adaptasi yang saling melengkapi dengan upaya adaptasi domestik, bukan sebagai solusi tunggal.

Literature review ini dimulai dengan kajian yang dilakukan oleh Kitara, Suliman, dan Farbotko dalam artikel mereka yang berjudul "Fale Pili: a Tuvaluan perspective on mobility justice" (2024). Dalam jurnal ini membahas berbagai kajian terkait konsep mobilitas, keadilan mobilitas, dan peran budaya lokal dalam membentuk respons terhadap perubahan iklim dan displacement di kawasan Pasifik. Beberapa studi menyoroti pentingnya nilai-nilai budaya dan praktik komunitas, seperti konsep *fale pili* dari Tuvalu, yang menekankan solidaritas, tanggung jawab bersama, dan batasan terbuka sebagai dasar mobilitas dan ketahanan komunitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap mobilitas harus dilihat dari perspektif budaya lokal yang mengedepankan kolektivisme dan hubungan sosial, berbeda dari pendekatan Barat yang lebih individualistik. Selain itu, kajian tersebut menegaskan bahwa konsep *fale pili* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka budaya, tetapi juga sebagai dasar dalam kebijakan dan praktik adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk migrasi internal dan internasional, serta hubungan antar negara. Dalam konteks ini, terdapat penekanan bahwa pendekatan yang berorientasi budaya dan kosmologi lokal dapat memperkuat keadilan mobilitas dan memperluas pemahaman tentang migrasi sebagai bentuk aksi kolektif dan identitas budaya.

Berdasarkan enam literatur yang telah dikaji, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai Falepili Union Treaty dan isu migrasi iklim Tuvalu sudah dibahas dari berbagai sudut pandang, seperti hukum internasional, hak asasi manusia, bantuan luar negeri, migrasi sebagai adaptasi, serta perspektif budaya dan keadilan

mobilitas. Studi-studi tersebut memberikan pemahaman penting mengenai ancaman perubahan iklim terhadap keberlanjutan Tuvalu, posisi Australia sebagai mitra utama, serta potensi migrasi sebagai solusi adaptif. Namun, sebagian besar kajian masih membahas isu tersebut secara terpisah dan belum mengaitkannya secara menyeluruh dalam satu analisis yang utuh, terutama dalam konteks hubungan internasional dan kebijakan luar negeri.

Celah penelitian muncul karena masih terbatas kajian yang melihat Falepili Union Treaty sebagai praktik diplomasi iklim Australia yang sekaligus memuat dimensi kemanusiaan dan kepentingan geopolitik kawasan Pasifik Selatan. Literatur yang ada cenderung menekankan aspek perlindungan atau adaptasi, tetapi belum banyak membahas bagaimana kebijakan migrasi permanen dalam perjanjian ini juga berfungsi sebagai instrumen strategis Australia dalam menjaga pengaruh regional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis Falepili Union Treaty secara komprehensif sebagai bentuk diplomasi iklim Australia yang berdampak pada keamanan manusia, kedaulatan Tuvalu, dan dinamika geopolitik di Pasifik Selatan.

"The 'New Pacific Diplomacy': An Introduction" yang ditulis oleh Sandra Tarte dan Greg Fry. Para penulis menegaskan bahwa konsep "New Pacific Diplomacy" menjelaskan adanya penegasan kemerdekaan diplomatik yang signifikan oleh negara-negara Pasifik dalam isu-isu penting seperti pengelolaan laut, perikanan, dan perubahan iklim. Sejak tahun 2009, telah terjadi "paradigm shift" mendasar dalam cara Pacific Island states berinteraksi dengan politik regional dan dunia, ditandai dengan seruan untuk suara Pasifik yang lebih lantang, kontrol Kepulauan Pasifik atas proses diplomatik, dan pembentukan saluran diplomatik baru di luar sistem Pacific Islands Forum (PIF) yang tradisional. Perkembangan institusional utama yang menggambarkan pergeseran ini meliputi revitalisasi Melanesian Spearhead Group (MSG), pembentukan Pacific Islands Development Forum (PIDF), dan peningkatan peran signifikan Pacific Small Island Developing States Group (PSIDS) di United Nations (UN). PSIDS, khususnya, telah menggantikan PIF sebagai forum pengorganisasi utama untuk representasi Pasifik

di tingkat global, terutama dalam isu-isu seperti mitigasi perubahan iklim dan sustainable development.

Transformasi ini didorong oleh persepsi bersama bahwa PIF, yang didominasi oleh Australia dan New Zealand, gagal menangani kekhawatiran penting, seperti posisi ekstrem Australia mengenai perubahan iklim, yang dianggap membingungkan dan membuat frustrasi para pemimpin Pasifik. Selain itu, keanggotaan Australia dan New Zealand di PIF menciptakan masalah logistik bagi negara-negara Pasifik dalam memanfaatkan koalisi global selatan, seperti Alliance of Small Island States (AOSIS) dan Group of 77 (G77), karena PIF tidak diakui sebagai kelompok selatan oleh koalisi-koalisi ini. Sistem diplomatik baru ini dicirikan oleh seruan untuk "*chart its own course*" (menentukan jalannya sendiri), keterlibatan global yang asertif, inklusivitas civil society dan private sector, serta pemanfaatan aliansi diplomatik selatan. Para penulis berpendapat bahwa pergeseran ini merupakan transformasi mendasar dalam ide-ide, institusi, dan praktik diplomatik, yang sebanding dengan perpindahan dari sistem diplomatik kolonial ke pascakolonial yang didirikan pada tahun 1971, dan juga dapat dilihat sebagai "*restoration of the original regional diplomatic culture*". Keberhasilan yang dicapai, seperti keuntungan finansial dari perjanjian akses tuna dan advokasi yang terkoordinasi mengenai kebijakan iklim global, memvalidasi pergeseran ini dan mendorong komitmen politik yang lebih besar untuk "*act regionally*".

Jurnal yang berjudul "Climate Change Diplomacy and the Geopolitics of Energy Transition" oleh Shehzad, Bakht, dan Nadeem, menyajikan analisis komprehensif mengenai persimpangan kritis antara kebijakan lingkungan global dan hubungan internasional. Argumen intinya adalah bahwa pergeseran yang diperlukan dari *fossil fuels* ke sumber energi *renewable* secara mendalam membentuk kembali dinamika kekuatan global, menuntut diplomasi yang adaptif dan inklusif untuk mengelola tantangan *transboundary*. Para penulis menyoroti tema-tema utama seperti kepentingan nasional yang saling bersaing (*competing national interests*), ketergantungan historis pada *fossil fuels*, dan disparitas teknologi dalam akses energi *renewable*, berpendapat bahwa keberhasilan transisi bergantung pada rekonsiliasi persaingan geopolitik dengan kebutuhan mendesak

untuk kelangsungan hidup planet. Diplomasi yang efektif, dicontohkan oleh upaya seperti *Paris Agreement*, dianggap sangat diperlukan untuk menyelaraskan kepentingan nasional yang berbeda dan memobilisasi tindakan kolektif, terutama dalam menjembatani kesenjangan antara dorongan negara-negara maju untuk *carbon neutrality* dan tuntutan negara-negara berkembang untuk 'carbon space' demi industrialisasi.

Realism digunakan untuk menjelaskan kebangkitan kembali politik kekuasaan (*power politics*), seperti persaingan yang intens atas *critical minerals* (lithium, cobalt) dan munculnya ketergantungan baru yang mengingatkan pada geopolitik minyak tradisional. Sebaliknya, *liberal institutionalism* menyoroti potensi solusi kooperatif melalui mekanisme seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) Uni Eropa dan jaringan energi lintas batas, berfokus pada mekanisme pasar dan tata kelola kelembagaan. Terakhir, *constructivism* menawarkan wawasan tentang dimensi normatif, menunjukkan bagaimana aksi iklim dan kepemimpinan telah terjalin dengan *soft power* dan legitimasi dalam politik internasional, mengubah perilaku negara bahkan tanpa mekanisme penegakan formal. Pendekatan multi-teoretis ini secara efektif menunjukkan bahwa tidak ada kerangka tunggal yang dapat sepenuhnya menjelaskan dinamika kompleks dari transisi energi dan diplomasi iklim.

Jurnal "Critical Reflections on the Theories of Security Studies Based on Climate Change Issues" karya Xuanchang Cao mengangkat isu perubahan iklim sebagai tantangan non-tradisional yang semakin penting dalam perspektif studi keamanan. Dalam analisisnya, Cao mengeksplorasi perdebatan antara teori keamanan tradisional, seperti realisme, dan pendekatan kritis, terutama konsep "securitization" yang diperkenalkan oleh Copenhagen School. Melalui pendekatan realis, penulis menegaskan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi pendorong utama perilaku negara dalam menghadapi perubahan iklim. Teori realisme, yang menekankan pentingnya aktor negara besar dan ketidakpastian dalam lingkungan internasional, memberikan kerangka untuk memahami respon negara-negara terhadap masalah iklim, meskipun bukan tanpa kritik.

Sebaliknya, konsep securitization di kritik karena terlalu menekankan peran bahasa dan abai terhadap kekuatan aktor negara yang sebenarnya paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, jurnal ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan kritis telah memperluas ruang lingkup studi keamanan dengan memasukkan isu lingkungan, teorinya masih kurang dapat menjelaskan dinamika kekuasaan yang nyata dalam politik internasional. Rangkuman analisis Cao menegaskan bahwa meskipun tantangan iklim bersifat transnasional, kerangka realistik tetap relevan dalam memahami interaksi antarnegara, sekaligus menyoroti perlunya keseimbangan antara pendekatan tradisional dan kritis dalam studi keamanan modern.

Jurnal "Leading from the Frontline: A History of Pacific Climate Diplomacy" oleh Wesley Morgan, Salā George Carter, dan Fulori Manoa menyoroti peran penting negara-negara kepulauan Pasifik dalam diplomasi iklim global, terutama dalam konteks ancaman perubahan iklim yang dianggap sebagai masalah keamanan. Penulis mencatat bahwa sejak 1991, negara-negara pulau Pasifik telah aktif dalam upaya diplomatik untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap perubahan iklim, berusaha memasukkan isu ini ke dalam agenda internasional melalui forum seperti Pacific Islands Forum dan negosiasi di PBB. Melalui pendekatan yang strategis, mereka berhasil membangun koalisi, salah satunya melalui Alliance of Small Island States (AOSIS), yang memainkan peran kunci dalam negosiasi, termasuk dalam pengesahan Paris Agreement pada 2015.

Jurnal ini menggabungkan berbagai pendekatan teoritis untuk menganalisis dinamika diplomasi iklim. Dengan menggunakan konsep securitization, penulis mengemukakan bagaimana negara-negara pulau Pasifik telah berhasil mengkontekstualisasikan perubahan iklim sebagai ancaman keamanan yang mendesak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa memahami perubahan iklim dalam kerangka ancaman terhadap eksistensi dan keselamatan negara dapat memberikan legitimasi moral yang kuat dalam diplomasi internasional. Selain itu, artikel ini menyoroti teori kolaborasi melalui pembentukan AOSIS dan koalisi tinggi, menunjukkan bahwa kerja sama multilateral adalah strategi yang efektif untuk memperkuat suara negara-negara kecil di panggung global. Dengan demikian,

jurnal ini tidak hanya menggambarkan perjalanan sejarah diplomasi iklim Pasifik, tetapi juga menekankan relevansi teori-teori keamanan dan kolaborasi dalam usaha diplomatik mereka untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.

Empat jurnal terakhir dalam tinjauan pustaka yakni kajian tentang *New Pacific Diplomacy*, diplomasi iklim dan geopolitik transisi energi, refleksi kritis teori keamanan berbasis isu iklim, serta sejarah diplomasi iklim negara-negara Pasifik secara umum memberikan landasan teoretis yang kuat dalam memahami perubahan iklim sebagai isu keamanan, arena diplomasi, dan bagian dari dinamika geopolitik global. Literatur tersebut menekankan peran negara, konstruksi ancaman iklim melalui proses sekritisasi, serta pentingnya kerja sama multilateral dan diplomasi normatif dalam merespons krisis iklim. Namun demikian, keempat kajian ini masih bersifat makro dan konseptual, dengan fokus pada dinamika global atau regional secara luas, sehingga belum secara spesifik mengaitkan kerangka teori tersebut dengan praktik kebijakan bilateral konkret, khususnya perjanjian migrasi iklim seperti Falepili Union Treaty. Dengan kata lain, masih terdapat celah analitis dalam menjelaskan bagaimana teori-teori diplomasi iklim, keamanan, dan geopolitik tersebut dioperasionalisasikan secara nyata dalam kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara kecil yang rentan, seperti Tuvalu.

Secara keseluruhan, sepuluh jurnal yang dikaji dalam tinjauan pustaka ini telah memberikan gambaran komprehensif mengenai isu perubahan iklim di Tuvalu, migrasi iklim, keberlanjutan status kenegaraan, bantuan luar negeri Australia, keadilan mobilitas, hingga diplomasi iklim dan geopolitik Pasifik Selatan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih cenderung membahas isu-isu tersebut secara terpisah, baik dari perspektif hukum internasional, hak asasi manusia, adaptasi migrasi, budaya lokal, maupun teori diplomasi dan keamanan. Masih terbatas kajian yang secara integratif menghubungkan kebijakan migrasi permanen dalam Falepili Union Treaty dengan strategi diplomasi iklim Australia serta implikasinya terhadap keamanan manusia, kedaulatan Tuvalu, dan dinamika geopolitik kawasan Pasifik Selatan secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis Falepili Union Treaty sebagai praktik diplomasi iklim

Australia yang bersifat multidimensional, tidak hanya sebagai respons kemanusiaan terhadap krisis iklim, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang memuat kepentingan strategis dan geopolitik di kawasan Pasifik Selatan.